



Inter-Parliamentary Union

Badan Kerja Sama Antar Parlemen Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022

Laporan Kick-off Meeting
dan Preliminary Discussion
dalam rangka
the G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20)

15 June 2022 | JW Marriott Hotel, Surabaya





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DPR RI
MASA PERSIDANGAN V
TAHUN SIDANG 2021-2022

Laporan Pelaksanaan “Kick-off Meeting dan Preliminary Discussion dalam rangka The 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20)”

Surabaya - Jawa Timur

15 Juni 2022

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Presidensi Indonesia di G20 mengangkat tema *Recover Together, Recover Stronger*. Sejalan dengan itu, DPR RI menekankan peran parlemen dalam pemulihan pasca pandemi melalui tema *‘Stronger Parliament for Sustainable Recovery’*. Tema ini akan menjadi bahan diskusi para ketua parlemen G20 pada perhelatan *the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit* pada bulan Oktober mendatang.

Pemulihan pasca pandemi Covid-19 telah menjadi isu global yang tidak hanya digaungkan negara-negara G20. Dalam konteks pembangunan, agenda pemulihan membawa *spirit build back better*, artinya, pemulihan membawa misi pembangunan masa depan yang lebih kuat dan lebih solid. Pada saat yang sama, komitmen global untuk pulih bersama telah menjadi agenda bahasan di berbagai forum multilateral di tingkat regional maupun global.

Pemulihan pasca-pandemi perlu ditopang oleh pembangunan yang berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau yang massif.

Parlemen, sebagai lembaga representasi, memiliki peran penting untuk menjembatani kepentingan publik. Selain melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, parlemen juga mampu mendorong percepatan pemulihan pasca pandemi melalui peran diplomasi untuk menggalang kekuatan global. Parlemen yang kuat dan efektif merupakan prasyarat bagi demokrasi untuk mendorong kesejahteraan bersama.

Peran DPR RI Indonesia di P20 memiliki tiga tujuan, yaitu: *pertama*, meningkatkan dimensi parlementer untuk mendukung agenda-agenda global; *kedua*, mendorong interaksi dan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan parlemen dalam implementasi hasil-hasil pertemuan G20; *ketiga*, memperkuat interaksi antara Ketua Parlemen negara-negara G20 dan negara-negara mitra, serta kerja sama dengan PBB dan organisasi internasional lainnya.

Terdapat empat isu prioritas yang akan menjadi pokok bahasan P20, yaitu:

1. Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau;
2. Tantangan Terkini: Krisis Pangan dan Krisis Energi, Stagflasi;
3. Parlemen Efektif dan Demokrasi yang dinamis;
4. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Pemulihan pasca-pandemi perlu ditopang oleh pembangunan yang berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau yang massif. Pada saat yang sama, pemulihan juga perlu dibarengi dengan pembangunan yang lebih inklusif. Dari sisi *governance*, pemulihan juga membutuhkan kepemimpinan politik yang efektif dan representatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu, agenda pemulihan juga harus menyoal berbagai kelompok terdampak termasuk upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Sebagai upaya membangun sinergi dan kolaborasi antara DPR RI dengan *stakeholders* terkait yang menjadi bagian dari G20, DPR RI akan mengadakan pertemuan perdana (*Kick-off*

meeting) sebagai pembukaan atas serangkaian pertemuan menjelang P20 Summit pada 6-7 Oktober 2022 mendatang.

Sebagai bagian dari Kick-off Meeting, juga akan dilakukan Diskusi Pendahuluan (*Preliminary Discussion*) yang secara spesifik membahas topik *sustainable recovery*. Diskusi pakar dengan para akademisi dan berbagai pihak di luar *Working Group* (WG) dan *Engagement Group* merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman substantif terkait topik utama dan isu prioritas P20. Diskusi pakar ini diharapkan akan menghadirkan berbagai perspektif terhadap isu pemulihan.

DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Partisipasi Delegasi DPR RI menghadiri *Kick-off Meeting dan Preliminary Discussion dalam Rangka the 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit* pada tanggal 15 Juni 2022 di Surabaya, Jawa Timur berdasarkan Surat Tugas No. 20/ST/BKSAP/DPR RI/VI/2022, tanggal 07 Juni 2022.

B. SUSUNAN DELEGASI

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Dr. Fadli Zon A-86	F - Partai Gerakan Indonesia Raya	Ketua BKSAP
2.	Putu Supadma Rudana A-563	F - Partai Demokrat	Wakil Ketua BKSAP
3.	Dr. Mardani Ali Sera A-422	F - Partai Keadilan Sejahtera	Wakil Ketua BKSAP
4.	Achmad Hafisz Tohir A-487	F - Partai Amanat Nasional	Wakil Ketua BKSAP
5.	Irine Yusiana Roba Puteri A-262	F - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota BKSAP
6.	Krisdayanti A-212	F - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota BKSAP
7.	Puteri Anetta Komarudin A-292	F - Partai Golongan Karya	Anggota BKSAP
8.	Kamrussamad A-79	F - Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota BKSAP

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
9.	Mulan Jameela A-96	F - Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota BKSAP
10.	Heru Widodo A-55	F - Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota BKSAP
11.	Muslim A-523	F - Partai Demokrat	Anggota BKSAP
12.	Syahrul Aidi Maazat A-418	F - Partai Keadilan Sejahterah	Anggota BKSAP
13.	Dr. Asman Abnur A-492	F - Partai Amanat Nasional	Anggota BKSAP
14.	Emma Umiyyatul Chusnah A-471	F - Partai Persatuan Pembangunan	Anggota BKSAP
15.	Dyah Roro Esti A-322	F - Partai Golongan Karya	Anggota BKSAP
16.	Ina Ammania A-218	F - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota BKSAP
17.	Ir. Hugua A-259	F - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota BKSAP

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGIRIMAN DELEGASI

Maksud dan tujuan pengiriman Delegasi DPR RI ke ***Kick-off Meeting dan Preliminary Discussion*** pada tanggal 15 Juni 2022 di Surabaya, Jakarta, yaitu:

1. *Kick-off Meeting dan Preliminary Discussion*, pada 15 Juni 2022 di Surabaya, Jawa Timur bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan bertukar informasi terkait penyelenggaraan *the 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit* di Jakarta.
2. Mendapatkan masukan terkait sejauh mana persiapan penyelenggaraan persidangan, maupun kebutuhan teknis dan substansi yang dibutuhkan oleh delegasi yang akan hadir.

D. MISI DELEGASI

Adapun misi Delegasi DPR RI mengikuti sidang tersebut, antara lain adalah:

1. Memperdalam pengetahuan terkini mengenai persidangan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit khususnya terkait tema besar yang diangkat, yaitu *"Stronger Parliament for Sustainable Recovery"*.
2. Menyampaikan pandangan Anggota DPR RI terkait topik-topik yang akan diangkat dan memastikan persidangan tersebut berjalan lancar dan sukses.

E. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Sebagai persiapan substansi Delegasi DPR RI ke pertemuan dimaksud, TA BKSAP telah menyiapkan bahan masukan untuk setiap pertemuan terkait isu-isu yang terkait dengan persidangan. Adapun untuk persiapan teknis, dipersiapkan oleh Sekretariat BKSAP.

II. ISI LAPORAN

A. AGENDA KEGIATAN

Kegiatan Kick-Off meeting dan diskusi pendahuluan dilakukan pada hari Rabu, 15 Juni 2022 di Surabaya. Kegiatan rinci ditampilkan pada tabel berikut ini.

WAKTU	KEGIATAN
09.30 – 10.00	Registrasi dan persiapan peserta (coffee break is provided)
10.00 – 10.10	Remarks: Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon
	<u>P20 Preliminary Discussion:</u>
10.10 – 10.35	Narasumber 1: FEB UNPAD
10.35 – 11.00	Narasumber 2: Ekonomi Politik, FISIP UNAIR
	Moderator : Pimpinan BKSAP

11.00 – 12.00	Diskusi dan tanya jawab
12.00 – 13.00	Lunch
	<u>Kickoff Meeting P20</u>
13.00 – 13.10	Video Opening Sosialisasi P20
13.10 – 13.20	Remarks: Pimpinan BKSAP DPR RI
13.20 – 13.30	Video Remarks: Presiden Inter-Parliamentary Union – Duarte Pacheco
13.30 – 13.40	Keynote Speech Ketua DPR RI – Dr. (HC) Puan Maharani
13.50 – 14.00	Penutupan

B. JALANNYA ACARA PRELIMINARY DISCUSSION

Preliminary Discussion atau juga disebut diskusi pakar dilaksanakan sebelum *kick-off meeting* bertujuan untuk: 1) Mendiskusikan pemulihan pasca-pandemi dari aspek pembangunan berkelanjutan dan transformasi menuju ekonomi hijau; 2) Mendiskusikan peran penting aspek *governance* untuk menopang pemulihan terutama peran parlemen dan demokrasi; 3) Meningkatkan pemahaman parlemen terhadap *sustainable recovery* dan isu-isu prioritasnya.

Dalam pelaksanaannya, diskusi pendahuluan ini dimoderatori oleh **Bapak Putu Supadma Rudana**, Wakil Ketua BKSAP DPR RI yang juga sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI asal Dapil Bali. Sesi ini menghadirkan dua pakar sebagai narasumber, yaitu **Bapak Prof. Arief Anshory Yusuf**, Guru Besar FEB Universitas Padjadjaran yang konsen terhadap isu *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan juga **Bapak I Gede Wahyu Wicaksana, Ph.D.**, Dosen dan Peneliti Senior Bidang Ekonomi Politik Internasional FISIP Universitas Airlangga yang fokus berbicara mengenai isu geopolitik.

1. Diskusi pendahuluan ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana pemulihan pasca-pandemi dan target pembangunan berkelanjutan bisa

- diintegrasikan?
2. Sejauh Mana kebijakan nasional termasuk kebijakan anggaran mengarah pada pencapaian pembangunan berkelanjutan?
 3. Apa saja tantangan transformasi menuju ekonomi hijau?
 4. Apa *quick-win* yang bisa didorong sebagai bagian dari transformasi ekonomi tersebut?
 5. Bagaimana pemulihan pasca-pandemi bisa didesain supaya sejalan dengan upaya-upaya untuk merespons tantangan global saat ini termasuk krisis pangan dan krisis energi?
 6. Apa yang menjadi peran krusial parlemen untuk mengatasi persoalan global ini?
 7. Sejauh Mana aspek tata kelola (*governance*) berperan dalam agenda pemulihan pasca-pandemi dan transisi menuju ekonomi hijau? peran apa yang perlu dijalankan parlemen untuk tujuan tersebut?

Wakil Ketua BKSAP DPR RI
Putu Supadma Rudana
saat menjadi moderator
Preliminary Discussion
the 8th G20 Parliamentary
Spaker's Summit (P20).

Foto: Dok BKSAP



Di awal sambutannya sebagai moderator, **Bapak Putu Supadma Rudana** menyampaikan rasa syukur bahwa Indonesia sedang memegang posisi penting G20 dan P20. Beberapa bulan lalu, Indonesia juga sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan *IPU Assembly ke 144* di Nusa Dua Bali. Kemudian, juga ditekankan bahwa melalui tema '*Stronger Parliament for Sustainable Recovery*'. DPR RI menitikberatkan pentingnya kekuatan parlemen untuk mendukung

pemerintah dalam pemulihan pasca pandemi dan merespons tantangan global saat ini.

Moderator juga menjelaskan mengapa peran parlemen ditekankan dalam tema tersebut. Hal itu dikarenakan parlemen, sebagai lembaga representasi, memiliki peran krusial untuk menjembatani kepentingan publik. Selain melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, parlemen juga mampu mendorong percepatan pemulihan pasca pandemi melalui peran diplomasi untuk menggalang kekuatan global.

Selanjutnya, moderator mempersilahkan Ketua BKSAP DPR RI **Dr. Fadli Zon** untuk menyampaikan sambutannya.

1. Sambutan Ketua BKSAP (Dr. Fadli Zon)

Dr. Fadli Zon mengawali sambutannya dengan mengangkat dua isu global yang saat ini dihadapi yaitu pemulihan pasca-pandemi dan eskalasi situasi keamanan global akibat krisis Rusia-Ukraina. Pertanyaannya adalah, mampukan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20, termasuk parlemen menggalang kekuatan untuk mengatasi persoalan tersebut.



Ketua BKSAP DPR RI
Dr. Fadli Zon.
Foto: Dok BKSAP

...kerja sama setiap pihak atau gotong royong merupakan kunci keberhasilan kepemimpinan Indonesia di G20.

Menurutnya, pertanyaan lanjutan dari krisis tersebut adalah: apakah tema dan substansi G20 Indonesia masih relevan? Hal ini penting karena krisis global tidak dapat segera diatasi jika situasi keamanan global tidak kondusif. Alih-alih berupaya pulih dari pandemi, kini dunia juga dihadapkan pada dampak dari krisis konflik Rusia-Ukraina yaitu berupa ancaman krisis dan kelangkaan pangan, inflasi, tingkat pengangguran yang meningkat, dan pelemahan ekonomi.

Karena itu, Ketua BKSAP menekankan bahwa panggung G20 adalah momentum sangat berharga bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinan global. Indonesia memiliki modalitas berupa negara dengan penduduk terbesar ke-4 sedunia, negara demokrasi terbesar ke-3, ekonomi terbesar ke-7, dan pemimpin kultural ASEAN. Berkaitan dengan hal itu, Indonesia harus bisa mengkapitalisasi modalitas tersebut untuk membawa dunia keluar dari masalah pandemi dan dampak perang.

Lebih lanjut, Dr. Fadli Zon menyatakan, kerja sama setiap pihak atau *gotong royong* merupakan kunci keberhasilan kepemimpinan Indonesia di G20. Dalam konteks nasional, DPR RI merupakan rekan utama pemerintah dalam menjalankan kepemimpinan di G20.

Dalam konteks acara, Dr. Fadli Zon menyampaikan bahwa forum diskusi pendahuluan merupakan inisiatif awal dalam rangkaian menuju perhelatan *the 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit* pada 6-7 Oktober 2022 di Jakarta. Diskusi pendahuluan ini diperlukan sebagai upaya untuk mendorong diskusi dalam kaitannya dengan Presidensi G20 Indonesia bersifat *science based inputs*.

Menurutnya, politik dan pendekatan ilmiah harus saling topang dalam merumuskan sebuah masukan dan kebijakan. Keduanya harus saling berkomunikasi, saling melengkapi, dan saling

DPR RI berupaya untuk mengambil peran substantif dan konstruktif di level nasional dan global bagi Presidensi G20 Indonesia yang berdampak nyata bagi umat manusia.

mengoreksi. Artinya, bukan hanya *political will* dan *good will* yang menjadi basis sebuah proses perumusan kebijakan, melainkan juga ilmu pengetahuan.

Terakhir, Ketua BKSAP juga menegaskan bahwa *The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit* yang bertajuk "*Stronger Parliament for Sustainable Recovery*" ini merupakan ikhtiar DPR untuk mensolidkan tema *G20 Recover Together, Recover Stronger*. DPR RI berupaya untuk mengambil peran substantif dan konstruktif di level nasional dan global bagi Presidensi G20 Indonesia yang berdampak nyata bagi umat manusia.

Melalui kegiatan diskusi pendahuluan, diharapkan berbagai isu prioritas P20 dapat didiskusikan secara terbuka dan mendapatkan masukan berupa rekomendasi-rekomendasi positif bagi parlemen yang lebih tangguh yang dapat menghadirkan pemulihan yang berkelanjutan khususnya dalam rangka memberikan dukungan Presidensi G20 Indonesia.

Setelah pemaparan sambutan oleh Ketua BKSAP, selanjutnya moderator Bapak Putu Supadma Rudana memulai diskusi dengan dua narasumber. Kesempatan pertama diberikan kepada **Prof. Arief Anshory Yusuf**. Beliau merupakan pengajar dan peneliti senior di *Center for Economics and Development Studies* serta *Founding Director* dari *Center for Sustainable Development Goals Studies* (SDGs Center), Universitas Padjadjaran. Selain itu, Prof. Arief juga merupakan Director of the Economy and Environment Institute Indonesia (EEI-Indonesia).

2. Paparan Narasumber 1 (Prof. Arief Anshory Yusuf)

Pada sesi diskusi, sejalan dengan isu prioritas pertama mengenai pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, **Prof. Arief Anshory Yusuf** menyampaikan bahwa SDGs merupakan

kesempatan global yang masih relevan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pemulihan ekonomi.

Menurutnya, dari sisi komitmen, SDGs lebih kuat dibandingkan dengan *Millenium Development Goals* (MDGs) karena merupakan komitmen global dari negara maju, negara berkembang, dan negara miskin. Selain itu, perbedaan mendasar dari MDGs ke SDGs adalah adanya penguatan aspek lingkungan dan aspek sosial pada target-target pembangunan. Mengapa SDGs bisa berhasil? karena kemampuan SDGs mengunci semua negara untuk menyepakati agenda global jangka panjang serta menentukan skala prioritas.



Suasana Preliminary Discussion the 8th G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20).
Foto: Dok BKSAP

Berkaitan dengan itu, secara umum, SDGs mengandung dua aspek tujuan intrinsik, yaitu: *pertama*, keadilan prosedural (semua pihak harus dilibatkan secara inklusif dalam berbagai level pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan), dan *kedua*, keadilan substansial yang mendasarkan pada *prinsip no one left behind*, sehingga mampu mengurangi ketimpangan global.

Di samping itu, keunggulan SDGs juga dapat dilihat dari mengutamakan konsep *justice* atau

...SDGs juga sangat sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk menciptakan keadilan dalam pembangunan

keadilan, yaitu *intra-generational justice* yaitu keadilan sosial dan *intergenerational justice* yaitu keadilan antar generasi yaitu aspek lingkungan. Oleh karena itu, SDGs juga sangat sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk menciptakan keadilan dalam pembangunan.

Prof. Arief juga menyinggung SDGs dalam kaitannya dengan proses pemulihan pasca Covid-19. Menurutnya, *recovery* di Indonesia terlambat karena *full-recovery* tercapai kalau tingkat pertumbuhan ekonomi sudah kembali ke angka pada periode pre-pandemik. Namun demikian, hal itu masih bisa dikejar dengan catatan perlu adanya kolaborasi dan peran multipihak termasuk peran parlemen.

Lebih lanjut, Guru Besar Universitas Padjadjaran tersebut juga mendorong parlemen untuk tetap berkomitmen terhadap esensi dari tujuan SDGs, yaitu untuk menciptakan keadilan (*justice*) baik secara prosedural, di mana semua pihak harus dilibatkan secara inklusif, maupun secara substansial, yaitu *no one left behind* sehingga mampu mengakselerasi pembangunan global.

Terakhir, menurutnya, parlemen harus fokus pada dua hal, *pertama*, merubah paradigma SDGs dari hanya mandat global menjadi kepentingan atau prioritas nasional. *Kedua*, parlemen juga punya modalitas untuk memperkuat *political will* dan *good will* dari para pengambil kebijakan untuk fokus ke isu SDGs.

3. Paparan Narasumber 2 (Dr. I Gede Wahyu Wicaksana)

Pemateri kedua adalah **Dr. I Gede Wahyu Wicaksana** dari UNAIR yang dikenalkan sebagai dosen dan peneliti senior bidang ekonomi politik internasional di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga. Beliau sangat konsen terhadap isu-isu ekonomi politik global terkini seperti perang Rusia-Ukraina, isu Indo-Pasifik, serta kebijakan luar negeri RI.

...selama
kurun waktu
10-20 tahun
dunia konsen
terhadap multi-
lateralisme tapi
mengabaikan
berbagai
persoalan
geopolitik...

Pada bagian awal paparannya, pakar politik internasional I Gede Wahyu Wicaksana mengatakan bahwa multilateralisme sudah tidak efektif mengatasi berbagai tantangan global karena mengabaikan sisi geopolitik sehingga “*we are making process but not progress*”. Satu hal yang terabaikan adalah covid-19 dan perang Rusia-Ukraina mengajarkan bahwa cara mengelola diplomasi internasional saat ini perlu dikoreksi.

Salah satu isu yang diabaikan oleh banyak pihak saat ini adalah isu geopolitik. Menurut Dr. I Gede, selama kurun waktu 10-20 tahun dunia konsen terhadap multilateralisme tapi mengabaikan berbagai persoalan geopolitik sehingga ini perlu menjadi perhatian banyak pihak. Sebagai contoh, perang dagang Amerika Serikat dan China telah menciptakan suatu bentuk perang baru atau bisa dikenal sebagai ‘*New Different Cold War*’. Perang dingin sekarang tidak bersifat ideologis tapi bersifat multi-agenda. Sehingga semua permasalahan berujung pada masalah geopolitik.

Berkaitan dengan itu, maka kepemimpinan Indonesia di G20 termasuk di P20 harus bisa memperhatikan persoalan ini. Faktanya, G20 merupakan entitas plural yang sulit diandalkan mampu mengatasi berbagai permasalahan global. Plural dari sisi sosial budaya karena seluruh anggota G20 memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda. Dari sisi ekonomi, kekuatan ekonomi dan karakter negara-negara anggota G20 juga berbeda satu dengan yang lainnya. Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang memimpin forum G20 setelah sebelumnya dipegang oleh Jepang dan Italia.

Oleh karena itu, cara negara dan berbagai pihak termasuk parlemen menjalankan diplomasi internasional perlu ditata ulang. Artinya, *global governance* perlu dikoreksi supaya mampu menjadi solusi bagi berbagai ancaman global

DPR RI harus mendorong suatu kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingan nasional RI sehingga tidak tersandera oleh berbagai agenda 'rutin' global.

mulai dari krisis pangan, krisis energi, stagflasi, perlambatan ekonomi, perubahan iklim, hingga ancaman keamanan regional dan global. Dalam momentum ini, parlemen mempunyai modalitas yang legitimate untuk menata ulang multilateralisme tersebut.

Paparan Dr. I Gede kemudian menghasilkan beberapa *quick-win* yang harus dilakukan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai anggota P20 dan G20: *Pertama*, DPR RI harus mendorong suatu kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingan nasional RI sehingga tidak tersandera oleh berbagai agenda 'rutin' global. Parlemen harus mendorong pemerintah untuk mengaplikasikan politik luar negeri bebas aktif dengan konkret agar sejalan dengan '*national interest*' bangsa Indonesia.

Kedua, DPR RI juga harus berperan menentukan identitas dan arah politik luar negeri RI. Meskipun secara nasional momennya bisa disisipkan pada 2024 dalam penyusunan RPJMN, tapi upaya tersebut harus mulai digaungkan sejak saat ini sejalan dengan keketuaan Indonesia di P20, G20.

Ketiga, parlemen harus mendorong agar P20 dan G20 menjadi world leader bukan hanya world forum yang mempertemukan pimpinan negara dan pimpinan parlemen secara formal. Parlemen harus menggeser paradigma *convening power* menjadi *policy making power*. Parlemen melalui P20 harus mendorong kekuatan G20 sebagai aktor multilateral.

Keempat, parlemen harus menentukan arah P20 dan G20 agar mampu merepresentasikan agenda-agenda pembangunan inklusif tidak hanya kepentingan negara-negara maju. Sehingga berbagai ketimpangan terutama dari sisi ekonomi di antara negara-negara anggota G20 bisa teratasi melalui kebijakan-kebijakan P20

4. Kesimpulan

Di akhir sesi, **Bapak Putu Supadma Rudana** selaku moderator menyampaikan beberapa kesimpulan, yaitu:

Dari sisi pembangunan berkelanjutan, SDGs merupakan kesempatan global yang masih *relevan* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pemulihan ekonomi. DPR RI dan tentunya pemerintah harus tetap komitmen terhadap inti SDGs, yaitu untuk menciptakan *justice* baik secara *procedural* (yaitu semua pihak harus dilibatkan secara inklusif) maupun secara *substantive* (dengan prinsip *no one left behind*) sehingga mampu mengakselerasi pembangunan global.

Oleh karena itu, poin pentingnya adalah apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu: 1) perubahan paradigma (*change paradigm*) dari SDGs sebagai mandat global menjadi suatu kebutuhan nasional sehingga SDGs benar-benar menjadi *mainstream* pembangunan; 2) mengatasi hambatan ekonomi politik (*resolve political economy constraint*). Artinya, kemauan politik harus ditingkatkan agar tidak ada pihak yang memperlakukan SDGs sebagai suatu alat untuk kepentingan tertentu melainkan untuk



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana saat Preliminary Discussion the 8th G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20).

Foto: Dok BKSAP

kepentingan nasional. Parlemen tentu harus fokus pada dua hal tersebut.

Dari sisi geopolitik, multilateralisme tidak efektif karena dunia fokus pada agenda di luar geopolitik “*we are making process but not progress*”. Satu hal yang juga terabaikan dari pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina adalah adanya kesalahan dalam mengelola dan menjalankan diplomasi internasional sehingga perlu dikoreksi. Artinya *global governance* perlu dikoreksi agar menyentuh berbagai akar persoalan geopolitik dan parlemen mempunyai peran untuk itu.

Dunia ini tidak lagi bipolar tapi sudah multipolar sehingga perlu ada politik luar negeri yang mengedepankan *multi-alignment principle* bukan hanya *non-alignment*. Oleh karena itu, **pertama**, parlemen harus mendorong suatu kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingan nasional sehingga tidak sibuk dengan berbagai agenda global yang bukan berasal dari kepentingan nasional. Indonesia harus mengaplikasikan politik luar negeri bebas aktif dengan fokus pada ‘*national interest*’. Parlemen harus berperan menentukan identitas dan arah politik luar negeri RI. Momen DPR RI ada di 2024 nanti dalam penyusunan RPJMN.

Kedua, parlemen harus mendorong agar G20 menjadi *world leader* bukan hanya *world forum* yang menggeser paradigma dari *convening power* atau kemampuan menggelar even menjadi *policy making power* yang menghasilkan suatu gerakan global. Parlemen melalui P20 harus mendorong kekuatan G20 sebagai aktor multilateral.

Secara spesifik, parlemen harus punya peran untuk membawa G20 agar tidak tersandera oleh geopolitik untuk kepentingan negara-negara tertentu. Artinya, parlemen harus menentukan arah P20 agar mampu merepresentasikan agenda-agenda pembangunan inklusif tidak hanya kepentingan negara berkembang.

...parlemen harus mendorong suatu kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingan nasional...

C. JALANNYA ACARA KICK-OFF

Setelah Diskusi Pendahuluan selesai sekitar pukul 12.00, agenda *Kick-off Meeting* P20 sempat tertunda dan baru dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Acara *Kick-off Meeting* dihadiri langsung oleh Ketua DPR RI, yaitu **Dr. (HC) Puan Maharani** yang hadir didampingi oleh pimpinan BKSAP DPR RI. Hadir pula Gubernur Jawa Timur **Khofifah Indar Parawansa** dan seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, serta Kapolda Jawa Timur.



Foto bersama Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani, Pimpinan dan Anggota BKSAP, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa serta jajaran Forkopimda Jatim.
Foto: Dok BKSAP

Acara *Kick-Off Meeting* diawali dengan video pembuka yang disusul dengan *video message* dari Presiden Inter Parliamentary Union (IPU) yaitu **Mr. Duarte Pacheco**.

Dalam pidatonya, Presiden IPU menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada DPR RI dan khususnya kepada Ketua DPR RI Dr. (HC) Puan Maharani atas komitmen Indonesia dalam mendorong kontribusi dan peran parlemen dalam mengatasi berbagai permasalahan global.

Menurutnya, dunia saat ini sedang berada dalam masalah besar diakibatkan oleh invasi Rusia ke Ukraina yang menciptakan krisis global. Dalam kondisi tersebut, tentunya komitmen dan tanggungjawab bersama parlemen merupakan

...semua negara memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi secara global...

hal pokok yang perlu terus diperkuat. Saat ini, komitmen saja dari parlemen tidak cukup untuk mengatasi krisis global. Perlu upaya lebih seperti aksi nyata dari parlemen yang dilakukan secara bersama-sama.

Presiden IPU juga memahami bahwa semua negara memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi secara global meskipun dengan kapasitas yang berbeda-beda. P20 diharapkan dapat menghasilkan suatu kekuatan besar untuk membawa dunia ke arah yang lebih baik, yaitu keluar dari pandemi dan mampu mengatasi berbagai dampak konflik global.

Terakhir, Presiden IPU juga menyampaikan terimakasih atas kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali pada bulan Maret lalu dan berharap kesuksesan serupa dapat kembali dirasakan pada perhelatan P20 pada Oktober tahun 2022 mendatang.

Sebagai bagian dari acara menuju **Kick-off Meeting**, pada kesempatan berikutnya ada sesi sambutan yang disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR RI **Bapak Gilang Dhielafararez** yang juga merupakan Anggota Komisi III DPR RI.

1. Sambutan Wakil Ketua BKSAP (Gilang Dhielafararez, SH., L.L.M)

Dalam sambutannya, **Bapak Gilang** menyampaikan kembali bahwa BKSAP seperti termaktub pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) adalah AKD di DPR yang bertugas *"membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain."*

Wakil Ketua BKSAP DPR RI
Gilang Dhielafararez
saat menyampaikan
sambutannya pada agenda
Kick-off Meeting and the
8th G20 Parliamentary
Speaker's Summit (P20).

Foto: Dok BKSAP



BKSAP merupakan penjuror (*focal point*) atau ujung tombak (*spearhead*) diplomasi parlemen DPR RI. Saat ini, BKSAP dipimpin oleh lima pimpinan yang terdiri dari 53 anggota dari lintas komisi dan fraksi. Pada Pasal 69 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 ditetapkan bahwa DPR mempunyai fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Lebih lanjut ketiga fungsi DPR tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.

Selanjutnya, Wakil Ketua BKSAP juga menegaskan, DPR RI mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberikan dukungan kepada politik luar negeri Pemerintah dalam kerangka mewujudkan kesuksesan presidensi Indonesia di G20. Dengan demikian, berbagai agenda yang telah disusun BKSAP mewakili DPR merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat presidensi Indonesia melalui tema *Stronger Parliament for Sustainable Recovery*.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa pertemuan parlemen atau lebih dikenal P20 (*The G20 Parliament Speakers Summit*) adalah

...engagement
parlemen
dapat
memastikan
rekomendasi-
rekomendasi
G20 yang
people-
centered...

satu dari 10 pertemuan non-pemerintah. P20 adalah forum yang dihadiri para ketua parlemen negara-negara G20 dan bertujuan untuk membawa dimensi parlementer di dalam tata kelola pemerintahan global, meningkatkan kesadaran dan membangun dukungan politik untuk komitmen internasional dan membantu memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi G20 dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam realitas nasional.

Dimensi parlemen sangat strategis terutama untuk memastikan dua hal. *Pertama*, diharapkan *engagement* parlemen dapat memastikan rekomendasi-rekomendasi G20 yang *people-centered* mengingat parlemen sebagai representasi masyarakat. *Kedua*, hampir semua anggota G20, dengan pengecualian beberapa negara (Cina, Rusia, dan Arab Saudi), merupakan negara demokratis dengan peran krusial parlemen dalam memastikan semua rekomendasi global G20 dapat diterapkan ke dalam kebijakan nasional.

Terakhir, Wakil Ketua BKSAP juga melaporkan kepada Ketua DPR RI mengenai pelaksanaan Diskusi Pendahuluan yang diadakan beberapa jam sebelumnya di tempat yang sama.

2. Kick-off P20 oleh Ketua DPR RI (Dr. HC. Puan Maharani)

Ketua DPR RI **Dr. (H.C.) Puan Maharani** mengawali pidatonya dengan mengingatkan betapa krisis kesehatan akibat COVID-19 di satu negara dengan mudah menyebar dan memberikan dampak mendalam di negara lainnya akibat dunia sudah terkoneksi. Menurutnya, sebelum pandemi melanda, dunia telah diterpa berbagai tantangan terutama perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan dan situasi geopolitik yang bergejolak.

Ketua DPR RI
Dr. (H.C) Puan Maharani
menyampaikan pidato pada
agenda Kick-off Meeting and
the 8th G20 Parliamentary
Speaker's Summit (P20).

Foto: Dok BKSAP



Selanjutnya, Ketua DPR RI juga menyampaikan dampak perang Rusia-Ukraina yang harus segera diatasi. Karena dunia yang semakin terkoneksi, krisis keamanan dan instabilitas di satu negara berpeluang untuk menyebarkan dampak *spillover*. Dunia harus mulai berjuang bersama untuk mengantisipasi krisis pangan dan energi serta stagflasi.

Di bawah semangat untuk mencegah resesi global berkepanjangan, negara-negara anggota G20 harus bergandengan tangan, mencari solusi efektif untuk penguatan ekonomi dunia. Menurutnya, G20 merepresentasikan 85 persen *output* ekonomi global, dua pertiga populasi dunia dan 75 persen perdagangan internasional. Suatu kekuatan besar yang dapat berkontribusi secara maksimal. Selain itu, G20 terdiri dari 11 negara maju dan 9 negara berkembang bermakna suara negara berkembang dapat lebih terakomodasi.

Lebih lanjut, Ketua DPR RI juga menegaskan bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang diundang menjadi anggota G20. Hal ini tentunya menjadi refleksi bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berperan di kancah ekonomi global dan juga

Untuk mewujudkan solusi permanen, dibutuhkan dukungan politik.

memiliki potensi kontribusi yang signifikan untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan dunia.

Untuk mewujudkan solusi permanen, dibutuhkan dukungan politik. Parlemen nasional menjadi *stakeholder* utama G20 untuk memberikan dukungan politik dan juga menjadi jembatan penyampaian visi misi G20 ke konstituen masing-masing.

Berdasarkan latar belakang tersebut, P20 dibentuk sebagai *engagement* parlemen dapat memastikan rekomendasi-rekomendasi G20 yang *people-centered engagement* parlemen dapat memastikan rekomendasi-rekomendasi G20 yang *people-centered* yang menjiwai G20 dan juga membawa elemen-elemen demokrasi, memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses agenda-agenda internasional.

Melalui KTT P20 sebagai forum tertinggi ketua-ketua parlemen negara anggota G20, P20 berupaya untuk: **Pertama**, mengembangkan dan menyumbangkan perspektif keparlemenan dalam agenda-agenda global yang diusung G20. **Kedua**, mendorong interaksi dan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah dan parlemen dalam implementasi berbagai hasil dan kesepakatan G20. **Ketiga**, memperkuat interaksi antara ketua-ketua parlemen negara-negara G20 dan negara-negara mitra, dengan PBB dan organisasi internasional terkait lainnya.

Keketuaan Indonesia di P20 tahun ini menyampaikan pesan yang sangat kuat ke dunia internasional bahwa demokrasi Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sudah sangat matang. Kemudian, strategi pemulihan pasca pandemi di Indonesia merupakan kerja bersama berbagai elemen nasional melalui prinsip gotong royong.

...pelaksanaan P20 di tahun 2022 ini dilakukan saat dunia tengah berada di titik kritis multi-lateralisme dan kerjasama internasional.

Ketua DPR RI juga menyampaikan bahwa pelaksanaan P20 di tahun 2022 ini dilakukan saat dunia tengah berada di titik kritis multilateralisme dan kerjasama internasional. Oleh karena itu, sebagai forum utama untuk kerjasama ekonomi internasional, G20 harus berbuat lebih banyak. Ketua DPR RI komitmen untuk 1) Menggalang suara parlemen negara anggota G20, 2) Memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan G20, 3) Mendukung implementasi hasil kesepakatan G20 bersama mitra-mitra kerja di parlemen nasional.

Berdasarkan ambisi tersebut, maka tema P20, yaitu *Stronger Parliament for Sustainable Recovery* dirumuskan. Parlemen yang kuat dan efektif adalah landasan demokrasi. Di dunia yang telah mengalami berbagai guncangan akibat pandemi, parlemen harus kuat untuk memastikan *check and balance* tetap dijalankan, menjamin proses pemulihan tetap adil dan inklusif, serta menjaga agar pemulihan pasca pandemi dijalankan secara berkelanjutan dan berkontribusi pada pencapaian SDGs.

Isu-isu prioritas yang diangkat parlemen di bawah tema besar tersebut meliputi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, tantangan terkini berupa krisis pangan dan energi, stagflasi, parlemen yang efektif dan demokrasi yang dinamis, dan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Di bagian akhir acara, Ketua DPR RI kemudian memegang tombol start di layar sebagai tanda rangkaian menuju *The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit* resmi dimulai.

III. KESIMPULAN

- A. Secara umum, pelaksanaan Diskusi Pendahuluan dan *Kick-Off Meeting* berjalan lancar.
- B. Dari sisi substantif, banyak hal yang diserap dari diskusi maupun paparan narasumber sebagai

bagian dari upaya untuk mendorong *science based policy commitment*.

C. Di samping itu, terlaksananya *Kick-off Meeting* juga menunjukkan komitmen kuat DPR RI untuk turut serta mengatasi berbagai macam isu global mulai dari SDGs, ekonomi hijau, ancaman krisis pangan dan energi, penguatan demokrasi hingga kesetaraan gender.



Foto bersama Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI
Foto: Dok BKSAP

IV. REKOMENDASI

DPR RI yang bertindak sebagai tuan rumah pada *the 8th G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20)* pada Oktober mendatang, harus menyiapkan segala sesuatu secara matang. Untuk itu, perlu banyak diskusi dan pertemuan-pertemuan yang melibatkan berbagai *stakeholder* agar pertemuan antar parlemen negara anggota G20 itu berjalan optimal.

V. PENUTUP

A. ANGGARAN

Kegiatan *Kick-off meeting dan Preliminary Discussion the 8th G20 Parliamentary Speaker's Summit* ini dilaksanakan dengan menggunakan (Mata Anggaran Keluaran) MAK. 001030.CF.5805. AEC.001.051.E.524111 sebesar Rp194.372.000,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

B. KETERANGAN LAMPIRAN

1. Dokumentasi Foto
2. Berita Media Cetak dan Elektronik
 - a. [“BKSAP: P20 Momentum Perkuat Kolaborasi Parlemen Untuk Hadapi Tantangan di Masa Depan”](#). 15 Juni 2022
 - b. [“Puteri Komarudin Dorong Penguatan Peran Parlemen G20 dalam Pemulihan Pandemi Global”](#). 15 Juni 2022

C. KATA PENUTUP

Demikian pokok-pokok laporan Delegasi DPR RI ke ***Kick-off Meeting dan Preliminary Discussion dalam rangka the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit*** pada tanggal 15 Juni 2022 di Surabaya, Jawa Timur. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juni 2022
KETUA BKSAP DPR RI,



Dr. Fadli Zon
A-86



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id